

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era persaingan global ini berbagai negara berlomba untuk menyusun berbagai strategi untuk mendukung kemajuan pembangunan di negaranya, tak terkecuali Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*) dan juga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam lingkup global. Pada saat ini secara global berbagai negara sedang menjalankan visi dan misinya masing-masing dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Program tersebut dibahas oleh PBB dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau *the sustainable development goals* dalam hal ini disingkat sebagai SDGS. Konsep tersebut disepakati dan digunakan sebagai pedoman dunia dalam kongres luar biasa oleh PBB yang dihadiri oleh seluruh negara anggota PBB termasuk Indonesia di tahun 2018. Kongres tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya suatu pembangunan bagi dunia secara global.

Pada tahun kedua program tersebut berjalan, dunia diterpa pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai kekacauan dan hambatan pembangunan dalam berbagai macam bidang dan wilayah. Di negara berkembang, kondisi tersebut diperparah akibat kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat mewarnai kondisi pembangunan diberbagai wilayah. Indonesia menjadi menjadi salah satu negara yang sangat terdampak. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dengan mencari solusi terbaik untuk mendongkrak keberhasilan pembangunan secara efektif. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan input maksimal dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada saat ini. Implementasi SDGS serta upaya untuk membuat masyarakat adaptif dan mandiri dalam pembangunan di tengah kondisi pandemi saat ini. Selain itu, pemerintah dapat mengoptimalkan setiap pelaksanaan pembangunan agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan cepat. Dengan begitu pemerintah perlu mendapat dukungan partisipasi masyarakat yang optimal serta

mengerahkan seluruh kapasitasnya untuk mendongkrak keberhasilan pembangunan suatu wilayah.

Kondisi pembangunan di Indonesia belum berjalan baik bahkan sebelum adanya pandemi covid-19. Hal ini didasarkan pada data koefisien terakhir yang di rilis oleh *The World of Bank* tahun 2020 atau organisasi bank dunia, yang menerangkan bahwa Indonesia mempunyai nilai koefisien sebesar 0,53. Dari nilai tersebut apabila dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat yang mempunyai nilai koefisien 0,76; Canada dengan nilai koefisien sebesar 0,80; serta negara-negara eropa misalnya seperti Swedia yang mempunyai nilai koefisien 0,81; Finlandia sekitar 0,80; negara-negara di Asia seperti Jepang dengan nilai koefisien 0,87; Korea Selatan dengan nilai koefisien 0,82; lebih lanjut di negara Asean sendiri seperti negara Singapura mencapai nilai koefisien tertinggi di dunia sebesar 0,88, maka Indonesia masih sangat tertinggal jauh yaitu diangka 0,53 dan perlu banyak belajar bahkan kepada salah satu negara Asean yaitu Singapura memiliki prestasi yang luar biasa. Indonesia sendiri masih di bawah Malaysia dan Thailand dimana masing-masing memiliki koefisien 0,71 dan 0,62. Sementara itu, standar kehidupan layak suatu negara dari data tersebut ada di ambang batas 0,70 minimal bagi negara yang tergolong berhasil dalam pembangunannya, artinya tingkat *dependency ratio* atau ketergantungannya memenuhi standar yang ada. Dengan adanya situasi kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini menambah besarnya tingkat *dependency ratio* di Indonesia.

Data tentang *Index Quality of Life Country of Asean* dipaparkan oleh Numbeo tahun 2020, menerangkan bahwa nilai koefisien Indonesia adalah 97,47 berada pada posisi rangking kedua terbawah. Posisi tersebut hanya unggul dari Vietnam dan Filipina dan masih berada jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura yang masing-masing mendapat nilai 118,32, 120,44 dan 144,39. Sementara itu, berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pembaharuan tahun 2019 data IPM tahun 2018, hanya ada satu provinsi yang mempunyai kategorisasi IPM cukup tinggi yaitu diangka 80,06 yakni DKI Jakarta, diikuti oleh provinsi lain dengan rata-rata skor IPM 68 sampai dengan 70 dengan kategori tinggi/cukup dan menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang. Dalam kondisi pandemi covid-19, angka IPM akan terus menurun apabila tidak segera ditangani. Pelaksanaan pembangunan tidak

akan terlaksana dengan baik apabila tidak mendapatkan dukungan serta partisipasi dari masyarakatnya untuk mendongkrak keberhasilan pembangunan. Berdasarkan data Bappenas tahun 2019-2014, dalam mendukung pembangunan pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran pembangunan desa, dari semula 250 triliun menjadi 400 triliun rupiah sampai dengan tahun 2024 dengan target membangun 5000 desa berkembang menjadi desa mandiri diseluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mengharapkan adanya sinergitas antara Kemensos dengan Kemendes RI dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui program ini untuk melancarkan pembangunan wilayah melalui program dan kegiatan yang ada.

Menurut Menteri Sosial RI Tri Risma Harini yang dikutip dari laman *kompas.com*, partisipasi masyarakat menjadi indikasi penting berjalannya suatu pembangunan, artinya tanpa partisipasi masyarakat yang baik suatu pembangunan dan berbagai program serta kegiatan dan juga pengglontoran dana desa akan menjadi percuma saja. Pemerintah memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dalam setiap kegiatan dan penyelenggaraan program yang ada, ini berarti tanpa adanya kajian mengenai kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masyarakat tidak akan membuat masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat akan berpartisipasi apabila kegiatan tersebut menguntungkan bagi mereka. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kajian ilmu pendidikan masyarakat sangat besar, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu pembangunan.

Hasil studi pustaka menunjukkan adanya masalah yang bisa diidentifikasi, yakni pembangunan di kabupaten Ciamis perlu dibenahi dan diperbaiki. Berdasarkan data BPS tahun 2019 tentang kesejahteraan wilayah, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan skor IPM 64,64. Dari data IPM tahun 2018, Kabupaten Ciamis yang berada di bawah Kabupaten Garut 65,42 dan Kabupaten Tasikmalaya 65,00. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan wilayah yang berada di Kabupaten Ciamis masih terhambat sehingga berdampak pada kurangnya inovasi daerah yang berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat.

Menurut Cohen, J. dan Uphoff (1977) mengenai pengungkapan partisipasi masyarakat menggunakan alat, berdasarkan teori tahapan pelaksanaan pembangunan sejatinya ada empat tahapan, yakni partisipasi dalam perencanaan (perencanaan pembangunan yang dilakukan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan), partisipasi dalam pelaksanaan (bentuk tenaga, bentuk materi), partisipasi dalam pemanfaatan hasil (pemanfaatan hasil pembangunan baik fisik dan non fisik), dan partisipasi dalam evaluasi (masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan menilai kegiatan pembangunan, inovasi yang dihasilkan dari pembangunan). Indikator tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengetahui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek atau tahapan pembangunan yang perlu dikaji. Pengkajian ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut berupa pemberian masukan dan rekomendasi dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang lebih baik lagi. Dengan harapan akan menghasilkan inovasi pembangunan yang lebih baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

Lewis (dalam Ernani Rustiadi, 2017 hlm.146) menyatakan bahwa ketidakikutsertaan masyarakat menjadi permasalahan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang cenderung dalam zona nyaman dan terpenuhinya *basic needs*. Masyarakat yang telah merasa cukup menjadi penyebab terhambatnya inovasi pembangunan dari masyarakat. Lebih lanjut menurut Slamet (2003, hlm.18), keberhasilan pembangunan harus diikuti dengan pengelolaan yang berkualitas dan matang serta perlu menganalisis faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*). Penggunaan teori ini dipertimbangkan oleh peneliti karena sesuai dengan fokus studi yang akan dijalani, yakni berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan di suatu masyarakat.

Secara konstitusi yang didasarkan pada amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) dan ditekankan oleh Kemendikbud, bahwa terdapat tiga jalur pendidikan yakni pendidikan formal, informal, dan non formal. Dapat diartikan bahwa, pendidikan formal saja tidak cukup melainkan perlu juga adanya pendidikan informal. Pada konsepnya, pendidikan non formal menekankan

pendidikan kepada masyarakat untuk diterapkan dalam suatu pembangunan yang dilaksanakan. Konsep pembangunan idealnya harus sejalan dengan konsep pendidikan masyarakat. Konsep tersebut salah satunya menekankan pemberdayaan masyarakat, atau dengan kata lain seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu memakai konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu bukan hanya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saja (*basic needs*), melainkan juga tentang bagaimana membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat. Menurut Adi Fahrudin (2019, hlm. 12-13), pemberdayaan masyarakat harus menekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat yang mana masyarakat perlu berperan aktif serta berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan hidup. Pembangunan harus dapat membuat keadaan sosial menjadi lebih baik dan memberikan nilai tambah (*add value*) untuk kesejahteraan penduduk desa (Saepudin, Kamarubiani, Shantini, 2020).

Konsep pendidikan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat harus mulai diperhatikan. Amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Permendes RI No. 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan pedesaan, dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur empat tahapan pembangunan, yakni tahap persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perlu memperhatikan tahapan-tahapan tersebut, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya guna mendukung pelaksanaan pembangunan secara optimal. Apabila kegiatan pembangunan tidak hanya mementingkan keberhasilan salah satu aspek saja, maka masyarakat dan pemerintah dapat saling bahu membahu untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dari berbagai aspek tanpa mengesampingkan salah satu aspek saja. Dalam bukunya pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat, Adi Fahrudin (2019, hlm.46) menyatakan bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keseimbangan antar aspek dan ketidakadaan salah satu dari aspek pembangunan maka dapat dikatakan cacat.

Lebih lanjut *link and match* dan komunikasi sosial yang terjalin dengan baik di masyarakat belum dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Menurut Purnomo, Hufad, Wahyudin, Akhyadi, & Lutfiansyah (2020), komunitas dalam konteks

pemberdayaan bukan hanya perihal pemberian informasi dan peningkatan keterampilan saja, akan tetapi memperbaiki masalah dan kesejahteraan secara kolaboratif-aktif dilakukan demi satu tujuan yang disepakati bersama. Analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan menjadi sangat penting untuk dapat mendefinisikan berbagai macam hambatan maupun tantangan yang digambarkan dalam suatu kajian komprehensif yang akan disusun.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat adanya perbedaan keunikan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap wilayah. Selain itu, penelitian tentang keilmuan pendidikan masyarakat menjadi sangat terbuka dan potensial untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan, hambatan, dan potensi setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan dalam setiap tahapan pembangunannya, dengan begitu dalam perkembangan keilmuan pendidikan masyarakat penelitian ini sangat krusial untuk dilakukan. Melalui penelitian ini rekomendasi dan solusi baru dalam pengembangan pembangunan disuatu wilayah dapat ditemukan. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi masukan terhadap tahapan pelaksanaan pembangunan di salah satu wilayah kajian melalui sebuah kajian yang dikembangkan. Kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi melalui analisis secara SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*) terhadap hambatan-hambatan yang terjadi secara unik dan khusus dalam pelaksanaan pembangunan disuatu wilayah. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

Dalam membatasi penelitian dan bidang ilmu, penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam kajian pemberdayaan masyarakat sebagai alat identifikasi masalah serta mendeskripsikan kelemahan, hambatan, dan tantangan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, hingga pemberian rekomendasi dan solusi lebih lanjut berdasarkan analisis SWOT dari hasil penelitian. Hal ini berdasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat yang apabila dilakukan dengan memanfaatkan seluruh kapasitas secara optimal sehingga tercipta tujuan akhir masyarakat yang semakin berdaya, mandiri, dan sejahtera (Akhyadi, Ramadani, Siregar, 2020).

Pembangunan saluran irigasi di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara rutin di

Desa Pawindan. Pembangunan ini merupakan otoritas dari Desa Pawindan yang dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung para pekerja. Irigasi yang saat ini tersedia belum menjangkau seluruh dusun yang ada di Desa Pawindan terutama dusun yang letaknya cukup jauh jangkauannya, sehingga pembangunan ini merupakan sebuah urgensi untuk dilakukan. Objek pembangunan ini dipilih penulis karena pembangunan irigasi ini rutin dilaksanakan setiap tahun di Desa Pawindan, sehingga penulis dapat mengamati secara langsung kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pawindan. Objek pembangunan tersebut sangat mendukung data lapangan (*field research*) yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini. Selanjutnya permasalahan lain yang dapat muncul dan dikhawatirkan muncul mengenai pengembangan inovasi pembangunan terkait hambatan atau inovasi pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat serta tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara utuh.

Desa Pawindan merupakan salah satu desa bungsu di Kabupaten Ciamis yang belum banyak dilakukan studi lapangan. Desa Pawindan masih perlu mendapatkan berbagai masukan terhadap kondisi pembangunan yang dilaksanakan melalui data lapangan dan riil. Oleh sebab itu, beberapa hal terkait kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pawindan perlu untuk diteliti lebih lanjut dan dianalisis secara akademis dengan keilmuan khusus yakni pendidikan masyarakat yang menitikberatkan terhadap pembangunan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengalaman terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Pawindan kedepannya.

Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pawindan hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok semata (*basic needs*) masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah desa belum mampu memenuhi dan pemeratakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan, sebaliknya partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan yang dilaksanakan sangat kurang. Kondisi inilah yang menjadi penyebab masyarakat tidak berkembang dan berdaya. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tergerak untuk memberikan kontribusi dan terlibat dalam pembangunan melalui penelitian yang akan dilaksanakan terhadap Desa Pawindan dengan judul

penelitian yaitu **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Analisis Kualitatif Deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah tengah fokus mempercepat optimalisasi pembangunan wilayah terutama wilayah pedesaan. Pemerintah tengah berupaya mempercepat tumbuhnya inovasi pembangunan dan perwujudan desa berkembang menjadi desa mandiri. Tanpa didukung partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang baik dan optimal dalam suatu pelaksanaan pembangunan maka hal tersebut tentunya akan sulit terealisasi. *Sumber : Berbagai Media tentang Arahan Pemerintah Pusat Terkait Program Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan.*
2. Masyarakat Desa Pawindan kurang peka dan tanggap serta kurangnya inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat maupun kehidupan pribadinya juga menurunnya gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Terutama kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar gotong-royong, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih perlu adanya pembinaan kembali. *Sumber : RPJMDES Tahun 2016-2022.*
3. Pemerintah Desa Pawindan telah beberapa kali menghasilkan inovasi pembangunan yang sejatinya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga beberapa kali menjadi sebuah prestasi bagi pemerintah Desa Pawindan dalam memunculkan suatu inovasi. *Sumber : Profil Prestasi Pemerintah Desa Pawindan.*
4. Pembangunan saluran irigasi merupakan fokus utama pembangunan di Desa Pawindan sebagai suatu pembangunan yang difasilitasi pemerintah desa setiap tahunnya. Pemerataan pembangunan saluran irigasi sangat penting dan selalu menjadi fokus pemerintah desa, karena belum merata dan terpenuhinya kebutuhan saluran irigasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan ekonomi

masyarakat sampai ke seluruh penjuru Desa Pawindan. Sumber : *RPMJDES Tahun 2016-2022*.

5. Pada musim kemarau sekitar 75% petani Desa Pawindan mengalami kesulitan air untuk mengaliri sawah karena tidak adanya sumber air maupun sawah tadah hujan. Sumber : *RPMJDES Tahun 2016-2022*.
6. Petani di Dusun Bunirasa, Desa Pawindan mengalami kesulitan air lebih dari Dusun Pasirpeteuy dan Dusun Rancautama. Hal ini merupakan akibat dari belum adanya teknis irigasi yang menjangkau Dusun Bunirasa, sehingga pembangunan saluran irigasi di Desa Pawindan belum merata. *Sumber : RPMJDES Tahun 2016-2022*.

Beberapa hal di atas merupakan akar masalah yang terjadi. Karakteristik masyarakat dan identifikasi kebutuhan yang tepat, terselenggaranya tahapan pembangunan yang sesuai dengan teori, komunikasi yang baik dan partisipasi masyarakat yang baik dalam pengembangannya, masih menjadi indikator yang sangat ideal bagi upaya keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan menjadi fokus peneliti ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat di setiap tahapan pembangunan dengan fokus pada objek tahapan pembangunan saluran irigasi dalam pembangunan yang terjadi di Desa Pawindan”. Kajian ini diperlukan sebagai upaya dukungan kepada pemerintah dalam optimalisasi pembangunan berdasarkan karakteristik, kondisi, dan pengembangan kebutuhan di wilayah.

Dari latar belakang di atas dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan saluran irigasi keikutsertaan dalam rapat-rapat perencanaan, dan perumusan-perumusan konsep serta teknis pembangunan di Desa Pawindan?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi jenis, bentuk, dan strategi pengembangan partisipasi masyarakat di Desa Pawindan?

3. Bagaimana cara pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan saluran irigasi di Desa Pawindan?
4. Analisis hambatan dan tantangan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi di Desa Pawindan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan bidang keilmuan dari penelitian sebelumnya. Pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas dan komprehensif ini dilakukan dengan cara studi lapangan pada suatu wilayah yang dengan terkait isu atau judul penelitian maupun topik yang diangkat. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengungkap keadaan atau fakta yang sebenarnya dari lokasi penelitian. Hasil akhirnya berupa susunan kajian komprehensif terkait suatu kondisi pembangunan di sebuah desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan atau diselenggarakan di desa tersebut guna mengetahui potensi, hambatan, dan kelemahan pelaksanaan pembangunan maupun kondisi partisipasi masyarakatnya. Hal-hal tersebut kemudian akan dianalisis secara teoritis dan menggunakan mekanisme khusus, sehingga menghasilkan rekomendasi khusus, penggalan potensi baru, temuan hambatan dan tantangan yang akan datang bagi pembangunan maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, serta identifikasi kebutuhan masyarakat di Desa Pawindan di masa yang akan datang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan saluran irigasi meliputi keikutsertaan dalam rapat-rapat perencanaan, dan perumusan-perumusan konsep serta teknis pembangunan di Desa Pawindan.

2. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi mulai dari jenis, bentuk, dan strategi pengembangan partisipasi masyarakat di Desa Pawindan.
3. Mendeskripsikan cara pemanfaatan dan perawatan hasil pembangunan serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan saluran irigasi di Desa Pawindan.
4. Menganalisis hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi di desa Pawindan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan saluran irigasi yang terjadi di desa Pawindan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teori dan Pengembangan Keilmuan

Secara teori dan pengembangan keilmuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan keilmuan bidang pendidikan masyarakat, pengembangan keilmuan pendidikan masyarakat, serta mengembangkan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dalam bidang keilmuan pendidikan masyarakat.

1.4.2 Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan kebijakan serta rekomendasi bagi penentu kebijakan yang sesuai dalam mendukung upaya perbaikan keberhasilan pembangunan di desa Pawindan.

1.4.3 Segi Praktik

Dari segi praktik penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah dalam pelaksanaan pembangunan.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Dari segi isu serta aksi sosial penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pembuktian kondisi nyata dari keadaan masyarakat dan juga sebagai ajang penggalan potensi pembangunan desa yang dapat dikembangkan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan masukan atau rekomendasi terhadap kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Pada akhirnya, hasil penelitian dapat menjadi gambaran dan juga pengalaman bagi masyarakat dalam upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat sebagai salah satu upaya memperbaiki pelaksanaan pembangunan di desa Pawindan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep mengenai masalah yang sedang diteliti.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas mengenai komponen dari metode penelitian, yakni lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional verbal, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini membahas tentang tafsiran terhadap hasil temuan penelitian berupa kesimpulan dan saran.